

# **MENGOPTIMALKAN BONUS DEMOGRAFI UNTUK MENGURANGI TINGKAT KEMISKINAN DI INDONESIA**

## ***OPTIMIZING DEMOGRAPHIC DIVIDEND TO REDUCE POVERTY RATE IN INDONESIA***

**Satria Aji Setiawan**

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan

### **Abstrak**

Bonus demografi adalah kondisi yang terjadi saat sebuah negara memiliki jumlah penduduk usia produktif yang lebih tinggi daripada penduduk usia non-produktif. Bonus demografi dikaitkan dengan munculnya suatu kesempatan yang disebut dengan jendela peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bonus demografi dapat bermanfaat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan instrumen yang sangat baik dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Dengan kata lain, bonus demografi yang dimanfaatkan dengan optimal akan mengurangi kemiskinan dengan signifikan. Namun demikian, melimpahnya penduduk bisa menciptakan kondisi yang buruk jika tidak dikelola dengan baik. Melimpahnya penduduk usia kerja yang tidak memiliki keahlian dan keterampilan dapat meningkatkan tingkat pengangguran, tingkat kriminalitas, tingkat kemiskinan, dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, berbagai kebijakan perlu dirumuskan untuk dapat memetik manfaat melalui jendela peluang yang diperkirakan akan terjadi pada tahun 2030-2040 di Indonesia. Dalam mengoptimalkan manfaat bonus demografi, ada beberapa hal yang dapat dilakukan, yaitu dengan mengembangkan kualitas manusia melalui pendidikan dan pelatihan, memperluas pasar tenaga kerja, mengelola pertumbuhan populasi, dan meningkatkan tingkat kesehatan penduduk.

**Kata kunci:** bonus demografi, jendela peluang, pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan.

### **Abstract**

*Demographic dividend is a condition that occurs when a country has a productive population that is higher than non-productive population. Demographic dividend associated with windows of opportunity that can be used to improve state prosperity. Demographic dividend can be very beneficial to boost economic growth. Economic growth is a powerful instrument in order to reducing poverty. In other words, the demographic dividend used optimally will significantly reduce poverty. However, the abundance of the population can create bad conditions if not managed properly. The abundance of unskilled and inept productive-age-citizens could increase unemployment rates, crime rates, poverty rates, and even restrict economic growth. Therefore, various policies need to be formulated to benefit from the windows of opportunity that will occur in 2030-2040 in Indonesia. In order to optimizing benefits of demographic dividend, there are several things can be done, namely by developing human capital quality through education and training, expanding increasing the potential labor market, managing the population growth, and increasing health level of citizens.*

**Keywords :** *demographic dividend, windows of opportunity, economic growth, poverty rate*

## A. LATAR BELAKANG

Perubahan struktur umur penduduk dan menurunnya beban ketergantungan memberikan peluang yang disebut bonus demografi. Bonus demografi dikaitkan dengan munculnya suatu kesempatan yang disebut dengan jendela peluang (*windows of opportunity*) yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Adioetomo, 2012). Pada tahun 2030-2040, Indonesia diprediksi akan mengalami masa bonus demografi, yaitu jumlah penduduk usia produktif (berusia 15-64 tahun) lebih besar dibandingkan penduduk usia tidak produktif (berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun). Pada periode tersebut, penduduk usia produktif diprediksi mencapai 64 persen dari total jumlah penduduk yang diproyeksikan sebesar 297 juta jiwa (Bappenas, 2017).

Jumlah dan struktur penduduk di suatu negara memegang peranan penting dalam menentukan kecepatan pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Pertumbuhan ekonomi memiliki dampak terhadap penduduk, dan sebaliknya, perubahan penduduk memiliki implikasi terhadap pembangunan perekonomian (Ray, 1998). Bonus demografi menciptakan peluang yang tinggi bagi Indonesia untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, karena penambahan penduduk adalah salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi bertumpu pada adanya penambahan penduduk yang akan memperluas pasar serta mendorong spesialisasi yang selanjutnya akan menghasilkan penambahan output atau hasil (Smith, 2012).

Adapun pertumbuhan ekonomi pada gilirannya akan bekerja dengan sangat baik dalam mengurangi tingkat kemiskinan (Rodrik, 2007). Berbagai negara telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang massif yang berdampak pada pengurangan tingkat kemiskinan di negaranya (Ravalion & Chen, 1997; Lin, 2003;

Bhanumurthy & Mitra, 2004; Arndt, James & Simler, 2006). Dengan kata lain, apabila Indonesia dapat memaksimalkan bonus demografi dengan baik, maka pertumbuhan ekonomi dapat didorong dengan maksimal, dan tingkat kemiskinan akan dapat berkurang dengan drastis.

Namun, bonus demografi yang dikelola dengan tidak tepat dapat menyebabkan permasalahan yang serius. Beberapa permasalahan yang dapat timbul adalah tingginya tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi yang melambat, tingginya tingkat kemiskinan, dan tingginya tingkat kriminalitas. Hal ini senada dengan yang disampaikan Solow (1956) yang menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk dapat berdampak positif dan dapat berdampak negatif. Oleh karenanya, penambahan penduduk harus dimanfaatkan sebagai sumber daya yang positif melalui pengambilan kebijakan-kebijakan untuk mengoptimalkan melimpahnya penduduk usia produktif tersebut.

Dalam rangka mengoptimalkan jendela peluang (*window of opportunity*) yang terbuka pada masa dimana suatu negara mengalami bonus demografi dan menghindari dampak negatif dari bonus demografi, kuantitas sumber daya manusia perlu diimbangi dengan kualitas yang memadai. Dalam hal ini, kualitas bukan hanya terkait dengan kapasitas otak, namun juga kapasitas fisik dari sumber daya manusia. Kebijakan sosial dan ekonomi yang tepat menjadi hal yang mutlak diperlukan untuk mengoptimalkan dampak dari bonus demografi tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, bonus demografi yang dikelola dengan baik dapat bermanfaat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tingkat kemiskinan. Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan bukti empiris di berbagai negara mengenai dampak bonus demografi dalam menurunkan tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta memberikan rekomendasi

kebijakan untuk mengoptimalkan bonus demografi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan.

## B. Studi Literatur

### 1. Bonus Demografi

Jika ditinjau secara struktur usia, penduduk dibagi menjadi tiga kelompok besar, yaitu kelompok usia muda (0-14 tahun), kelompok usia produktif (15-64 tahun), dan kelompok usia lanjut (diatas 64 tahun). Kelompok usia muda dan kelompok usia lanjut dianggap tidak dapat menghasilkan produksi, sehingga jumlah penduduk yang terlalu tinggi di kedua kategori tersebut dapat menjadi penghambat dalam pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, melimpahnya penduduk di usia produktif dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi.

Bonus demografi adalah percepatan pertumbuhan ekonomi sebagai hasil dari penurunan tingkat kematian dan kesuburan di suatu negara dan merupakan perubahan selanjutnya dari perubahan struktur usia dari sebuah populasi. Dengan tingkat kelahiran yang lebih kecil setiap tahunnya, jumlah penduduk usia di bawah produktif akan tumbuh lebih kecil jika dibandingkan dengan populasi penduduk usia kerja. Dengan lebih sedikit jumlah penduduk lanjut usia, maka negara memiliki jendela peluang (*window of opportunity*) untuk pertumbuhan ekonomi yang cepat jika kebijakan sosial dan ekonomi dapat dirumuskan dengan tepat serta melakukan investasi pada hal yang diperlukan (Gribble, 2012).

Bonus demografi adalah keadaan ketika terjadi penurunan rasio ketergantungan (*dependency ratio*) yang disebabkan oleh transisi demografi. Bonus demografi adalah potensi keuntungan ekonomis yang didapatkan oleh suatu negara karena proporsi penduduk yang produktif lebih banyak dibandingkan dengan yang tidak produktif. Bonus demografi dimaknai sebagai keuntungan

ekonomis yang disebabkan oleh semakin besarnya jumlah tabungan dari penduduk produktif sehingga dapat memicu investasi dan pertumbuhan ekonomi (Jati, 2015).

### 2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan rangkaian kegiatan yang bersumber pada manusia, akumulasi modal, pemakaian teknologi modern, dan hasil atau output. Adapun pertumbuhan penduduk dapat berdampak positif dan dapat berdampak negatif. Oleh karenanya, penambahan penduduk harus dimanfaatkan sebagai sumber daya yang positif (Solow, 1956). Pertumbuhan ekonomi bertumpu pada adanya penambahan penduduk yang akan memperluas pasar serta mendorong spesialisasi yang pada gilirannya akan menghasilkan penambahan output atau hasil. (Smith, 2012).

Pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan kemampuan jangka panjang suatu negara dalam menyediakan berbagai jenis barang-barang ekonomi dengan jumlah yang banyak kepada penduduknya. Pertumbuhan ekonomi dicapai oleh tiga faktor yaitu peningkatan persediaan barang yang terus-menerus, perkembangan teknologi, penggunaan teknologi secara efektif dan efisien (Kuznets, 1955).

Pertumbuhan ekonomi merujuk pada peningkatan kapasitas produksi ekonomi sebagai hasil dari kapabilitas ekonomi dalam memproduksi tambahan jumlah barang dan jasa. Pada dasarnya, standar hidup diukur dari jumlah barang dan jasa yang tersedia, sehingga pertumbuhan ekonomi sejalan dengan peningkatan standar hidup. Pertumbuhan ekonomi sangat penting karena pertumbuhan ekonomi berarti meningkatkan kualitas standar hidup. (Palmer, 2012).

Pertumbuhan ekonomi adalah fenomena yang kompleks dan berjangka panjang, yang berpotensi mengalami kendala seperti: peningkatan populasi yang berlebihan, sumber daya yang terbatas,

infrastruktur yang tidak memadai, penggunaan sumber daya yang tidak efisien, intervensi pemerintah yang berlebihan, model kelembagaan, dan budaya yang membuat peningkatan sulit.

Pertumbuhan ekonomi diperoleh dengan penggunaan sumber daya yang tersedia secara efisien dan dengan meningkatkan kapasitas produksi suatu negara. Ini memfasilitasi redistribusi pendapatan antara penduduk dan masyarakat. Efek kumulatif, perbedaan kecil dari tingkat kenaikan, menjadi besar untuk periode satu dekade atau lebih. Lebih mudah untuk mendistribusikan kembali pendapatan dalam masyarakat yang dinamis dan bertumbuh, dari pada yang statis.

Pertumbuhan ekonomi mengandaikan modifikasi dari output potensial, karena modifikasi dari penawaran faktor (tenaga kerja dan modal) atau peningkatan produktivitas faktor (output per unit input). Ketika laju pertumbuhan ekonomi besar, produksi barang dan jasa naik dan, akibatnya, tingkat pengangguran menurun, jumlah kesempatan kerja meningkat, serta standar kehidupan penduduk (Haller, 2012).

### 3. Kemiskinan

Garis kemiskinan dengan menggunakan satuan dolar per hari terkenal di Bank Dunia merupakan temuan penelitian ilmiah yang signifikan pada tahun 1980-an, dan menjadi satuan ukuran bank untuk mengukur kemiskinan pada tahun 1990. Metrik tersebut mencapai kematangan penuh ketika itu diabadikan dalam *Millenium Development Goals* sebagai standar untuk melacak kemiskinan di seluruh dunia (Allen, 2017).

Kemiskinan bukan hanya keterbatasan pendapatan, kemiskinan adalah gabungan dari perampasan manusia dari pengetahuan, kesehatan, martabat dan hak, dan hambatan untuk berpartisipasi. Kemiskinan harus diukur dengan mempertimbangkan kompleksitas ini, sehingga kita dapat

mengidentifikasi dan mengatasi akar penyebabnya, dan memicu kemajuan nyata dalam strategi pengentasan kemiskinan yang ditargetkan (UNDP, 2016).

Secara umum, kemiskinan dapat dibagi menjadi kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah sebuah kondisi yang dicirikan dengan kekurangan parah kebutuhan dasar manusia, termasuk makanan, air minum yang layak, fasilitas sanitasi, kesehatan, rumah, pendidikan, dan informasi (Deklarasi Kopenhagen, 1995). Kemiskinan absolut adalah sejumlah penduduk yang tidak mampu mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar (Todaro dan Smith, 2006).

Orang yang sangat miskin adalah orang yang hidup dengan pendapatan kurang dari satu dolar per hari, dan kategori miskin dengan pendapatan kurang dari dua dolar per hari. Klasifikasi yang lain adalah pendapatan sebesar satu dolar per hari sebagai kategori miskin dan pendapatan dua dolar per hari sebagai kategori miskin menengah. Kemiskinan secara absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan seseorang untuk mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Kebutuhan pokok minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang. Nilai kebutuhan minimum kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan.

Garis kemiskinan absolut tetap dalam hal standar hidup, garis kemiskinan absolut mampu membandingkan kemiskinan secara umum. Namun demikian, antara negara yang satu dengan lainnya memiliki garis kemiskinan yang berbeda. Berdasarkan hal tersebut, Bank Dunia menetapkan garis kemiskinan internasional agar dapat membandingkan angka kemiskinan antar negara. Garis kemiskinan tersebut tidak mengenal tapal batas antar negara, tidak tergantung pada tingkat

pendapatan per kapita di suatu negara, dan juga memperhitungkan perbedaan tingkat harga antar negara dengan mengukur penduduk miskin sebagai orang yang hidup kurang dari satu dolar atau dua dolar per hari dalam dolar PPP (*Purchasing Power Parity*).

Kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Dengan demikian, ukuran kemiskinan relatif sangat tergantung pada distribusi pendapatan/pengeluaran penduduk. Dalam hal mengidentifikasi dan menentukan sasaran penduduk miskin, maka garis kemiskinan relatif cukup untuk digunakan, dan perlu disesuaikan terhadap tingkat pembangunan negara secara keseluruhan. Garis kemiskinan relatif tidak dapat dipakai untuk membandingkan tingkat kemiskinan antar negara dan waktu karena tidak mencerminkan tingkat kesejahteraan yang sama.

### C. Metode Penelitian

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan mendeskripsikan hubungan antara bonus demografi dalam pertumbuhan ekonomi dan penurunan tingkat kemiskinan dengan memaparkan bukti empiris yang terjadi di berbagai negara. Metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu rangkaian kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nazir, 1988). Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif, yaitu penelitian yang memberi gambaran secara cermat mengenai individu

atau kelompok tertentu tentang keadaan dan gejala yang terjadi (Koentjaraningrat, 1993).

Metode yang digunakan dalam pencarian data dan informasi yaitu penelitian pustaka dan menelaah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan (Sugiyono, 2009).

### D. Analisis dan Pembahasan

Selama bertahun-tahun, banyak ahli di bidang ekonomi memperdebatkan pengaruh dari perubahan populasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam perdebatan tersebut, terdapat tiga posisi berbeda. Pandangan pertama meyakini bahwa peningkatan populasi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, pandangan kedua berpendapat bahwa peningkatan populasi dapat mendukung dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, dan pandangan terakhir meyakini bahwa peningkatan populasi tidak memiliki dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Berbagai penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa peningkatan penduduk yang terjadi di berbagai negara di dunia mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. Bonus demografi yang dikelola dengan baik mampu menstimulus pertumbuhan ekonomi (Bloom, Canning, & Malaney, 1999; Mason, 2001; Ross, 2004).

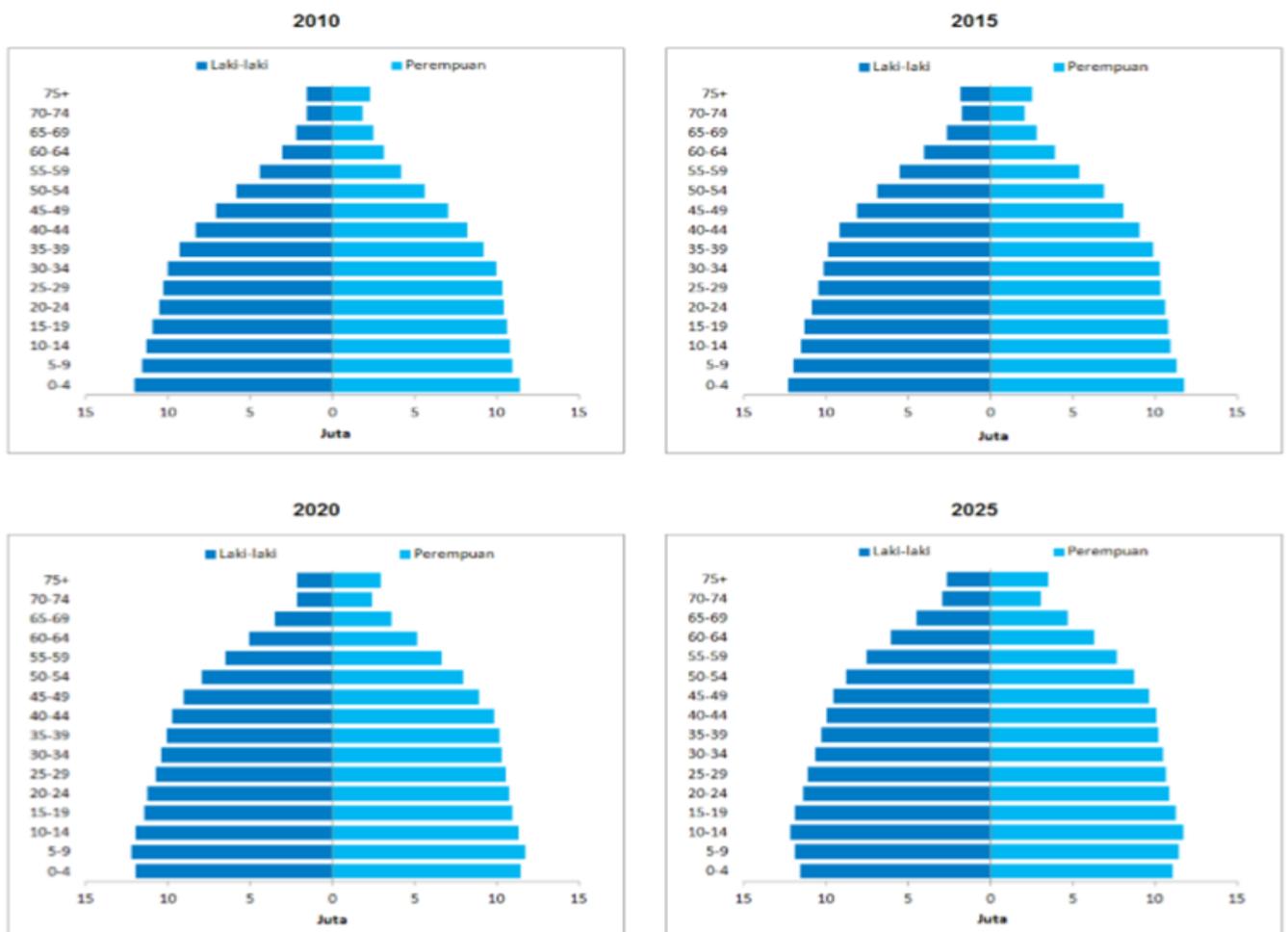
*Department For International Development* (DFID) dalam salah satu publikasinya menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah instrumen yang paling baik dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup bagi negara berkembang. Berbagai studi berhasil membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang cepat dan

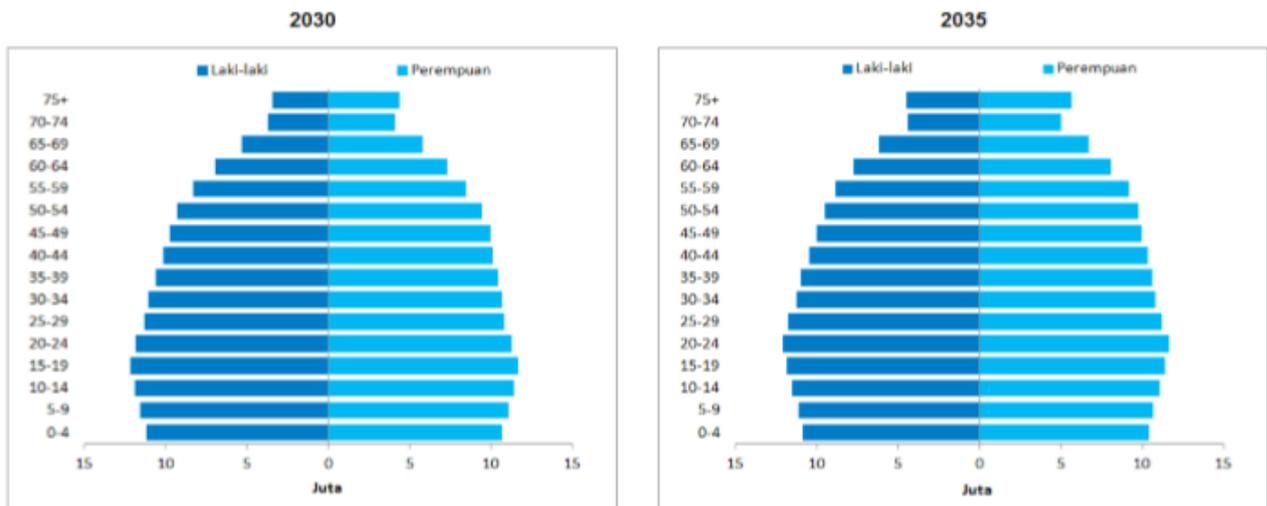
berkesinambungan adalah hal yang penting dalam pengentasan kemiskinan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan yang kuat antara pertumbuhan ekonomi dengan pengurangan tingkat kemiskinan (Ravalion& Chen, 1997; Adams, 2002; Lin, 2003; Bhanumurthy & Mitra, 2004; Arndt, James&Simler, 2006; World Bank, 2012; OPPG Programme, 2015).

1. Bonus Demografi Indonesia

Pada tahun 2030-2040, Indonesia diprediksi akan mengalami masa bonus demografi, yaitu jumlah penduduk usia

produktif (berusia 15-64 tahun) lebih besar dibandingkan penduduk usia tidak produktif (berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun). Pada periode tersebut, penduduk usia produktif diprediksi mencapai 64 persen dari total jumlah penduduk yang diproyeksikan sebesar 297 juta jiwa (Bappenas, 2017). Gambaran lebih rinci mengenai proporsi penduduk usia produktif dan non produktif serta jumlah penduduk di tiap propinsi di Indonesia dapat dilihat dalam Tabel 1 dan Gambar 1.





Gambar 1. Piramida Penduduk Indonesia Tahun 2010-2035

Sumber: Bappenas, 2013

Tabel 1. Proyeksi Penduduk Indonesia berdasarkan Propinsi, 2010-2035 (Ribuan)

Provinsi	Tahun					
	2010	2015	2020	2025	2030	2035
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	4 523,1	5 002,0	5 459,9	5 870,0	6 227,6	6 541,4
Sumatera Utara	13 028,7	13 937,8	14 703,5	15 311,2	15 763,7	16 073,4
Sumatera Barat	4 865,3	5 196,3	5 498,8	5 757,8	5 968,3	6 130,4
Riau	5 574,9	6 344,4	7 128,3	7 898,5	8 643,3	9 363,0
Jambi	3 107,6	3 402,1	3 677,9	3 926,6	4 142,3	4 322,9
Sumatera Selatan	7 481,6	8 052,3	8 567,9	9 000,4	9 345,2	9 610,7
Bengkulu	1 722,1	1 874,9	2 019,8	2 150,5	2 264,3	2 360,6
Lampung	7 634,0	8 117,3	8 521,2	8 824,6	9 026,2	9 136,1
Kep. Bangka Belitung	1 230,2	1 372,8	1 517,6	1 657,5	1 788,9	1 911,0
Kepulauan Riau	1 692,8	1 973,0	2 242,2	2 501,5	2 768,5	3 050,5
<b>Pulau Sumatera</b>	<b>50 860,3</b>	<b>55 272,9</b>	<b>59 337,1</b>	<b>62 898,6</b>	<b>65 938,3</b>	<b>68 500,0</b>
DKI Jakarta	9 640,4	10 177,9	10 645,0	11 034,0	11 310,0	11 459,6
Jawa Barat	43 227,1	46 709,6	49 935,7	52 785,7	55 193,8	57 137,3
Jawa Tengah	32 443,9	33 774,1	34 940,1	35 958,6	36 751,7	37 219,4
DI Yogyakarta	3 467,5	3 679,2	3 882,3	4 064,6	4 220,2	4 348,5
Jawa Timur	37 565,8	38 847,6	39 886,3	40 646,1	41 077,3	41 127,7
Banten	10 688,6	11 955,2	13 160,5	14 249,0	15 201,8	16 033,1
<b>Pulau Jawa</b>	<b>137 033,3</b>	<b>145 143,6</b>	<b>152 449,9</b>	<b>158 738,0</b>	<b>163 754,8</b>	<b>167 325,6</b>
Bali	3 907,4	4 152,8	4 380,8	4 586,0	4 765,4	4 912,4
N T B	4 516,1	4 835,6	5 125,6	5 375,6	5 583,8	5 754,2
N T T	4 706,2	5 120,1	5 541,4	5 970,8	6 402,2	6 829,1
<b>Bali dan Kep. Nusa Tenggara</b>	<b>13 129,7</b>	<b>14 108,5</b>	<b>15 047,8</b>	<b>15 932,4</b>	<b>16 751,4</b>	<b>17 495,7</b>
Kalimantan Barat	4 411,4	4 789,6	5 134,8	5 432,6	5 679,2	5 878,1
Kalimantan Tengah	2 220,8	2 495,0	2 769,2	3 031,0	3 273,6	3 494,5
Kalimantan Selatan	3 642,6	3 989,8	4 304,0	4 578,3	4 814,2	5 016,3
Kalimantan Timur	3 576,1	4 068,6	4 561,7	5 040,7	5 497,0	5 929,2
<b>Pulau Kalimantan</b>	<b>13 850,9</b>	<b>15 343,0</b>	<b>16 769,7</b>	<b>18 082,6</b>	<b>19 264,0</b>	<b>20 318,1</b>
Sulawesi Utara	2 277,7	2 412,1	2 528,8	2 624,3	2 696,1	2 743,7
Sulawesi Tengah	2 646,0	2 876,7	3 097,0	3 299,5	3 480,6	3 640,8
Sulawesi Selatan	8 060,4	8 520,3	8 928,0	9 265,5	9 521,7	9 696,0
Sulawesi Tenggara	2 243,6	2 499,5	2 755,6	3 003,0	3 237,7	3 458,1
Gorontalo	1 044,8	1 133,2	1 219,6	1 299,7	1 370,2	1 430,1
Sulawesi Barat	1 164,6	1 282,2	1 405,0	1 527,8	1 647,2	1 763,3
<b>Pulau Sulawesi</b>	<b>17 437,1</b>	<b>18 724,0</b>	<b>19 934,0</b>	<b>21 019,8</b>	<b>21 953,5</b>	<b>22 732,0</b>
Maluku	1 541,9	1 686,5	1 831,9	1 972,7	2 104,2	2 227,8
Maluku Utara	1 043,3	1 162,3	1 278,8	1 391,0	1 499,4	1 603,6
<b>Kep. Maluku</b>	<b>2 585,2</b>	<b>2 848,8</b>	<b>3 110,7</b>	<b>3 363,7</b>	<b>3 603,6</b>	<b>3 831,4</b>
Papua Barat	765,3	871,5	981,8	1 092,2	1 200,1	1 305,0
Papua	2 857,0	3 149,4	3 435,4	3 701,7	3 939,4	4 144,6
<b>Pulau Papua</b>	<b>3 622,3</b>	<b>4 020,9</b>	<b>4 417,2</b>	<b>4 793,9</b>	<b>5 139,5</b>	<b>5 449,6</b>
<b>Indonesia</b>	<b>238 518,8</b>	<b>255 461,7</b>	<b>271 066,4</b>	<b>284 829,0</b>	<b>296 405,1</b>	<b>305 652,4</b>

Sumber: Bappenas, 2013

Manfaat besar dari bonus demografi hanya akan didapatkan jika suatu negara memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas dapat memicu pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pendapatan per kapita suatu negara karena ada banyak kesempatan kerja yang produktif. Hal yang kedua, terserapnya tenaga kerja menjadi faktor penting dalam memanfaatkan bonus demografi karena dengan tingkat kebutuhan tenaga kerja yang tinggi, maka tingkat pengangguran akan berkurang dan tingkat kesejahteraan akan meningkat pesat. Hal yang ketiga, peningkatan jumlah tabungan di tingkat rumah tangga. Setiap rumah tangga memiliki potensi untuk membuka suatu usaha yang akan memberi lapangan pekerjaan untuk orang lain sehingga angka pengangguran menurun. Dan yang terakhir, peran perempuan yang masuk ke dalam pasar tenaga kerja akan membantu peningkatan pendapatan dan pada akhirnya menyebabkan jumlah penduduk di usia produktif dapat diserap secara optimal di pasar tenaga kerja (Adioetomo, 2012).

## 2. Bonus Demografi dan Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan jumlah penduduk dapat berdampak positif dan dapat berdampak negatif. Oleh karenanya, penambahan penduduk harus dimanfaatkan sebagai sumber daya yang positif (Solow, 1956). Pertumbuhan ekonomi bertumpu pada adanya penambahan penduduk yang akan memperluas pasar serta mendorong spesialisasi yang pada gilirannya akan menghasilkan penambahan output atau hasil. (Smith, 2012).

Namun, perlu diperhatikan bahwa pertumbuhan ekonomi bukan merupakan dampak otomatis yang akan diperoleh, tapi juga memerlukan kebijakan yang tepat. Berbagai faktor seperti kebijakan perdagangan, kebijakan industri, pendidikan, administrasi pemerintah, budaya, geografi, tabungan, dan akumulasi modal adalah faktor penting lainnya untuk

mendukung bonus demografi. Ada empat langkah kebijakan untuk mencapai bonus demografi: menginisiasi perubahan demografi, meningkatkan kesehatan masyarakat, berinvestasi dalam pendidikan, dan menerapkan kebijakan dan tata kelola ekonomi. Langkah pertama menuju bonus demografi adalah penurunan tingkat kesuburan yang cepat melalui investasi dalam keluarga berencana, kelangsungan hidup anak dan mendidik anak perempuan. Anak-anak yang sehat menjadi lebih baik di sekolah, dan keberhasilan ini akhirnya berkontribusi pada angkatan kerja yang memiliki keterampilan lebih tinggi. Sistem pendidikan harus fokus untuk memastikan bahwa lebih banyak anak yang menyelesaikan sekolah dan memberi keterampilan pada penduduk usia produktif untuk beradaptasi dengan pasar tenaga kerja yang berubah. Kebijakan ekonomi dan pemerintahan harus mendorong pertumbuhan pekerjaan dan investasi di sektor padat karya, mendukung perluasan infrastruktur, mempromosikan perdagangan untuk memastikan akses ke pasar internasional, dan menciptakan lingkungan yang aman dan insentif untuk investasi langsung asing (NCPD, 2014).

Secara singkat, kita dapat membahas bagaimana bonus demografi dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Perubahan struktur usia penduduk, kelahiran anak, dan harapan hidup menciptakan peluang khusus untuk pertumbuhan ekonomi yang cepat. Dalam hal ini, terdapat tiga peluang yang telah diidentifikasi oleh para ahli demografi (Ross, 2004) sebagai berikut:

- a) Perluasan potensi tenaga kerja. Sebagai contoh, menurunnya tingkat kesuburan dan angka kematian di Jepang, Korea Selatan, Singapura, Thailand, dan Indonesia mengakibatkan perubahan dalam struktur usia penduduk mereka. Hal yang paling penting untuk pertumbuhan ekonomi adalah perubahan dalam ukuran penduduk

usia produktif terhadap dua populasi yang memiliki ketergantungan, yaitu anak-anak (dibawah 15 tahun) dan orang tua (diatas 64 tahun). Antara 1960 dan 1990, angkatan kerja di enam negara Asia tersebut tumbuh lebih cepat daripada jumlah penduduk rata-rata 25 persen. Hasil dari bonus demografi ini adalah peningkatan pendapatan per kapita sekitar 0,8 persen per tahun.

- b) Kondisi menguntungkan untuk meningkatkan tabungan dan investasi. Asia Timur sebagai contoh intrusif, dimana tingginya tingkat akumulasi sumber daya manusia dipandang sebagai faktor utama dibalik kesuksesan ekonomi (Bloom, Canning, & Malaney, 1999). Hal ini berarti bahwa bonus demografi menyediakan kesempatan untuk peningkatan tabungan dan investasi untuk pembangunan ekonomi (Ross, 2004). Pada tahun 1965 hingga 1990, modal tiap pekerja tumbuh pada tingkat tahunan lebih dari 8 persen di Korea Selatan dan Taiwan, hampir 8 persen di Jepang dan lebih dari 6 persen di Thailand. Dibandingkan dengan tahun 1970, tabungan dan investasi tahunan meningkat hingga hampir dua kali lipat pada tahun 1980-an dan hampir dua kali lipat lagi pada tahun 1990-an. Ada beberapa alasan untuk menjelaskan tingginya tingkat tabungan dan investasi di Asia Timur. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa perubahan dalam struktur usia penduduk, kelahiran anak dan harapan hidup semua merupakan faktor pendukung hal tersebut. Karena orang Asia Timur memiliki lebih sedikit anak, mereka dapat menabung lebih banyak. Dengan peningkatan harapan hidup dan rata-rata usia pensiun menurun, mereka juga memiliki insentif yang lebih besar untuk menabung dalam mengantisipasi pensiun (Mason, 2001).

- c) Kondisi yang menguntungkan untuk investasi dalam sumber daya manusia. Hal tersebut merupakan dampak perubahan demografi pada pendidikan. Rasio ketergantungan penduduk remaja yang tinggi dapat mengurangi kemampuan orang tua untuk membiayai investasi pendidikan. Terdapat beberapa bukti makroekonomi yang menunjukkan dampak negatif tentang ukuran keluarga dengan tingkat pendaftaran sekolah dan pencapaian pendidikan (Bloom, Canning, & Malaney, 1999). Penurunan tingkat kesuburan memiliki dampak langsung pada anggaran pendidikan, baik untuk keluarga maupun untuk negara. Tingkat kelahiran yang lebih rendah berarti lebih sedikit anak yang masuk sekolah beberapa tahun kemudian. Jika anggaran pendidikan suatu negara tetap konstan, maka pengeluaran tiap anak usia sekolah akan lebih tinggi. Sebagai alternatif, bagian yang dikurangi dari pendapatan nasional dapat diinvestasikan dalam pendidikan tanpa mengurangi pengeluaran per anak. Penurunan kesuburan memiliki dampak serupa pada sumber daya yang tersedia untuk program kesehatan anak dan pada pembelanjaan tingkat keluarga untuk kesehatan anak dan pendidikan.

### 3. Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan

Sejak tahun 2000, pertumbuhan ekonomi di Indonesia mulai berkembang dengan baik. Peningkatan yang konsisten dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bahkan ditunjukkan sejak tahun 1990 hingga 2017 (UNDP, 2018). IPM pada tahun 2017 mencapai 70,81, mengalami peningkatan sebesar 0,63 poin atau tumbuh sebesar 0,90 persen dibandingkan tahun sebelumnya (BPS, 2018). Selain itu, proporsi penduduk Indonesia yang berada pada tingkat

kemiskinan ekstrim telah turun dari 40 persen menjadi 8 persen. Namun, jika garis kemiskinan moderat Bank Dunia sebesar \$ 3,10 digunakan, jumlah penduduk Indonesia yang hidup dalam garis kemiskinan mencapai 93 juta jiwa atau sebesar 36 persen dari populasi. Banyaknya penduduk Indonesia yang hidup sedikit diatas garis kemiskinan juga membuat mereka rentan untuk kembali ke dalam kemiskinan (Oxfam, 2017).

Banyak penelitian yang telah dilakukan untuk membandingkan pengalaman berbagai negara berkembang secara konsisten menemukan bukti kuat bahwa pertumbuhan ekonomi yang cepat dan berkelanjutan adalah cara paling penting dan efektif untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Dari studi lintas negara ini, diperkirakan bahwa peningkatan 10 persen dalam pendapatan rata-rata negara akan mengurangi tingkat kemiskinan antara 20 dan 30 persen (Adams, 2002; World Bank, 2012, Ravallion & Chen, 1997).

Peran penting dari pertumbuhan ekonomi dalam mengurangi tingkat kemiskinan juga dibuktikan oleh penelitian pada tiap negara maupun banyak negara. Sebagai contoh, sebuah penelitian terhadap 14 negara pada 1990 menemukan bahwa selama satu dekade, tingkat kemiskinan menurun di 11 negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan tingkat kemiskinan meningkat di 3 negara dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah atau stagnan (OPPG Programme, 2015).

Berbagai penelitian di berbagai negara juga menunjukkan seberapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi dalam rangka menurunkan tingkat kemiskinan. China berhasil mengeluarkan 450 juta penduduknya dari kemiskinan sejak tahun 1979. Berbagai bukti menunjukkan bahwa tingginya pertumbuhan ekonomi antara tahun 1985 hingga 2001 sangat penting dalam penurunan tingkat kemiskinan yang sangat besar tersebut (Lin, 2003). Di India, penurunan tingkat kemiskinan dengan sangat signifikan terjadi sejak tahun 1980.

Penurunan tingkat kemiskinan tersebut sangat terkait erat dengan pertumbuhan ekonomi India yang sangat tinggi pada periode tersebut (Bhanumurthy & Mitra, 2004). Di Benua Afrika, Mozambik menunjukkan penurunan tingkat kemiskinan yang cepat yang dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi pada jangka waktu yang lebih singkat. Dari tahun 1996 hingga 2002, ekonomi Mozambik bertumbuh 62 persen dan proporsi dari penduduk yang hidup dalam kemiskinan menurun dari 69 persen menjadi 54 persen (Arndt, James & Simler, 2006). Data tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dan pengurangan jumlah kemiskinan, sehingga salah satu cara yang paling efektif untuk mengurangi kemiskinan adalah dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

## **E. Simpulan dan Rekomendasi**

Bonus demografi yang terjadi di berbagai negara di dunia menunjukkan korelasi yang positif dengan pertumbuhan ekonomi. Bonus demografi yang dikelola dengan baik mampu menstimulus pertumbuhan ekonomi (Bloom, Canning, & Malaney, 1999; Mason, 2001; Ross, 2004). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan yang kuat antara pertumbuhan ekonomi dengan pengurangan tingkat kemiskinan (Ravallion & Chen, 1997; Adams, 2002; Lin, 2003; Bhanumurthy & Mitra, 2004; Arndt, James & Simler, 2006; World Bank, 2012; OPPG Programme, 2015). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa bonus demografi dapat dioptimalkan untuk mengurangi tingkat kemiskinan melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Bonus demografi dapat memberikan keuntungan bagi Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tingkat kemiskinan. Namun, manfaat itu tidak serta merta didapatkan ketika Indonesia mengalami bonus demografi. Berbagai cara perlu dilakukan

untuk dapat memetik manfaat dari *window of opportunity* yang diciptakan oleh bonus demografi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat dicapai dengan memiliki sumber daya manusia berkualitas yang dapat memicu pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pendapatan perkapita suatu negara karena ada banyak kesempatan kerja yang produktif. Hal yang kedua, terserapnya tenaga kerja menjadi faktor penting dalam memanfaatkan bonus demografi karena dengan tingkat kebutuhan tenaga kerja yang tinggi, maka tingkat pengangguran akan berkurang dan tingkat kesejahteraan akan meningkat pesat. Hal yang ketiga, peningkatan jumlah tabungan di tingkat rumah tangga. Setiap rumah tangga memiliki potensi untuk membuka suatu usaha yang akan memberi lapangan pekerjaan untuk orang lain sehingga angka pengangguran menurun. Dan yang terakhir, peran perempuan yang masuk ke dalam pasar tenaga kerja akan membantu peningkatan pendapatan dan pada akhirnya menyebabkan jumlah penduduk di usia produktif dapat diserap secara optimal di pasar tenaga kerja.

Berdasarkan penjelasan tersebut, ada beberapa hal yang bisa dilaksanakan untuk memaksimalkan manfaat bonus demografi di Indonesia sebagai berikut:

### **1. Mengembangkan kualitas manusia melalui pendidikan dan pelatihan.**

Melimpahnya penduduk usia produktif perlu diimbangi dengan kualitas yang memiliki daya saing. Globalisasi menyebabkan persaingan semakin ketat, sehingga penduduk usia produktif perlu memiliki keahlian dan keterampilan yang sejalan dengan kebutuhan industri. Kualitas dan kuantitas pendidikan dan pelatihan di Indonesia perlu ditingkatkan untuk menciptakan tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing, serta sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Pemerintah dapat melakukan revitalisasi dan mengembangkan pendidikan kejuruan atau

vokasi untuk meningkatkan tenaga terampil, meningkatkan inovasi, dan kreativitas. Penciptaan tenaga terampil melalui pendidikan non formal juga perlu ditingkatkan melalui pemberian kursus dan pelatihan di Balai Latihan Kerja.

### **2. Memperluas pasar tenaga kerja.**

Jumlah tenaga kerja yang besar bisa menjadi beban bagi pertumbuhan ekonomi jika bursa tenaga kerja yang tersedia tidak mampu menampung mereka. Dampak buruk yang timbul adalah pengangguran yang tinggi, yang pada gilirannya menyebabkan tingkat kriminalitas semakin tinggi serta meningkatkan tingkat kemiskinan. Maka pasar tenaga kerja perlu ditingkatkan dan diperluas agar sebanyak mungkin penduduk usia produktif dapat terserap di pasar tenaga kerja. Hal ini akan meningkatkan produksi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

### **3. Mengelola pertumbuhan populasi.**

Bonus demografi yang ada perlu dijaga dengan baik, sehingga pertumbuhan populasi perlu dikontrol untuk menjaga agar rasio ketergantungan (*dependency ratio*) tetap berada di titik yang optimal. Rasio ketergantungan yang terlalu tinggi dapat membebani pertumbuhan ekonomi, sehingga perlu dijaga dengan baik. Hal ini bisa dilakukan salah satunya melalui program Keluarga Berencana (KB).

### **4. Meningkatkan tingkat kesehatan penduduk.**

Penduduk di usia produktif yang tidak sehat tidak akan mendukung produksi dan akan menghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Maka melimpahnya penduduk usia produktif perlu didukung dengan tingkat kesehatan yang tinggi. Dalam hal ini, pemerintah dapat mendukung dengan meningkatkan kualitas asuransi kesehatan dan mengeluarkan kebijakan yang dapat mendukung kesehatan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adams, Richard, 2003, *Economic Growth, Inequality and Poverty: Findings from a New Data Set, Policy Research Working Paper*, Washington: World Bank.
- Allen, Robert C., 2017, *Absolute Poverty: When Necessity Displaces Desire*, Oxford: Nuffield College.
- Arndt, James, dan Simler, 2008, *Has Economic Growth in Mozambique Been Pro-Poor?*, Journal of African Economies Vol. 15 No. 4, Oxford: Oxford University Press.
- Bhanumurthy, NR dan Mitra, A, 2004, *Economic Growth, Poverty, and Inequality in Indian States in the Pre-reform and Reform Periods*, Asian Development Review Vol. 21 No. 2, London: MIT Press Journals.
- Bloom, D.E, Canning, D, dan Malaney, P.N, 1999, *Demographic Change and Economic Growth in Asia*, CID Working Paper No. 15, New York: Centre for International Development at Harvard University.
- Bloom, David E., Canning, David, dan Sevilla, Canning, 2003, *The Demographic Dividend A New Perspective on the Economic Consequences of Population Change*, California: RAND.
- Gribble, James N., dan Bremner, Jason, 202, *Achieving a Demographic Dividend*, Washington: Population Reference Bureau.
- Haller, Alina Petronela, 2012, *Concepts of Economic Growth and Development. Challenges of Crisis and of Knowledge, Economy Transdisciplinarity Cognition*. Vol. 15 No.1, Bacau: George Bacovia University Printing House.
- Jati, Wasito R, 2014, *Bonus Demografi Sebagai Mesin Pertumbuhan Ekonomi: Jendela Peluang atau Jendela Bencana di Indonesia*, Jurnal Populasi Vol. 25 Nomor 1 Tahun 2015, Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan.
- Koentjaraningrat, 1993, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Kuznets, Simon, 1955, *Economic Growth and Income Equality*, The American Economic Review Vol.45 No.1, Nashville: American Economic Association.
- Lin, 2003, *Economic Growth, Income Inequality, and Poverty Reduction in People's Republic of China*, Asian Development Review Vol. 20 No.2, London: MIT Press Journals.
- Mason, A, 2001, *Population Change and Economic Development: What We Learned from the East Asia Experience?*, San Francisco: Paper Presented at the Meetings of the Western Economic Association International.
- Nazir, M, 1988, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Operationalising Pro-Poor Growth (OPPG) Programme, 2005, *Pro-Poor Growth in the 1990s: lessons and insights from 14 countries*, Washington: The World Bank.
- Ravallion, M & S Chen, 1997, *What Can New Survey Data Tell Us about Recent Changes in*

- Distribution and Poverty?*, The World Bank Economic Review, Oxford: Oxford University Press.
- Ray, Debraj, 1998, *Development Economics*, New Jersey: Princeton University Press.
- Rodrik, Dani, 2007, *One Economics, Many Recipes: Globalization, Institutions and Economic Growth*, New York: Harvard University.
- Ross, John, 2004, *Understanding the Demographic Dividend*, Washington: USAID.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Smith, Adam, 2012, *Wealth of Nations*, Hertfordshire: Wordsworth Editions.
- Todaro, MP, dan Smith, SC, 2006, *Economic Development Ninth Edition*, Boston: Addison Wesley Publishing Company.
- UNDP, 2016, *Eradicate Poverty, Leave No One Behind*, New York: UNDP Innovation Facility.

### **Dokumen**

- Adioetomo, Sri Murtiningsih, 2012, *Transisi Demografi, Bonus Demografi, dan The Window of Opportunity*.
- Department For International Development, Building Jobs and Prosperity in Developing Countries.
- National Council for Population and Development (NCPD), 2014. *Policy Brief No. 44*. United Nations, 1995, *Copenhagen Declaration on Social Development*.

### **Website**

- Bappenas.2018. "Peer Learning and Knowledge Sharing." [https://www.bappenas.go.id/files/9215/0397/6050/Siaran\\_Pers\\_Peer\\_Learning\\_and\\_Knowledge\\_Sharing\\_Workshop.pdf](https://www.bappenas.go.id/files/9215/0397/6050/Siaran_Pers_Peer_Learning_and_Knowledge_Sharing_Workshop.pdf). Diakses pada 17 Oktober 2018
- Bappenas.2018. "Indeks Pembangunan Manusia." <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/04/16/1535/indeks-pembangunan-manusia-ipm--indonesia-pada-tahun-2017-mencapai-70-81--kualitas-kesehatan--pendidikan--dan-pemenuhan-kebutuhan-hidup-masyarakat-indonesia-mengalami-peningkatan.html>. Diakses pada 25 Oktober 2018
- UNDP. 2018. "Human Development Indicators." <http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/IDN#> diakses pada 25 Oktober 2018